

PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Meidy Kantohe¹, Miryam P. Lonto², Mikhaela Poluakan³

¹Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

²Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

³Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

Penulis koresponden: mikhaelapoluakan16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan (Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa memiliki indeks RB (Reformasi Birokrasi) dengan nilai C, nilai tersebut memiliki interpretasi kurang. Dilihat dari indikator Reformasi Birokrasi (RB), dalam hal pengelolaan keuangan yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi, Kabupaten Minahasa masih di angka 96,67 menurut (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2022) ini berarti bahwa Kabupaten Minahasa Belum Mencapai angka 100 atau dengan kata lain belum mencapai tahapan bebas korupsi. Metode Penelitian Kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang di sebar kepada seluruh pengelola keuangan Satuan Kinerja Perangkat Desa (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Minahasa dengan jumlah sampel 53 orang. Data di olah dengan teknik Regresi Linear Berganda menggunakan SPSS 20. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya tanggungjawab yang baik dalam pengelolaan keuangan kantor dinas dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Transparansi juga terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa jika dalam ruang lingkup pemerintahan adanya transparansi atau keterbukaan maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan dalam pemerintahan tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah secara teoritis penelitian saya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan secara praktis dapat memberikan masukan kepada pemerintah terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan.

KATA KUNCI

Akuntabilitas Keuangan,
Transparansi, Pengelolaan
Keuangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang dimuat dalam (Kementrian PAN, 2022), Kabupaten Minahasa memiliki indeks RB (Reformasi Birokrasi) dengan nilai C, nilai tersebut memiliki interpretasi kurang. Dilihat dari indikator Reformasi Birokrasi (RB), dalam hal pengelolaan keuangan yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi, Kabupaten Minahasa masih di angka 96,67 menurut (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2022) ini berarti bahwa Kabupaten Minahasa Belum Mencapai angka 100 atau dengan kata lain belum mencapai tahapan bebas korupsi. Ini mengacu pada ditetapkannya 2 (dua) tersangka tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Minahasa lebih tepatnya pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di ketahui bahwa tersangka membuat laporan pertanggung jawaban yang berdasarkan bukti pengeluaran yang tidak sah karena tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya (*Kejari Minahasa, 2022*)

Dalam (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019) Pengelolaan Keuangan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah, APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah serta ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh pejabat yang dikenal sebagai pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang mereka dapat termasuk informasi, transfer data, penggunaan dan penyampaian dokumen elektronik. Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai secara moneter, serta segala jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban tersebut (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan

Menurut, pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, implementasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran, dan merupakan rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Zega et al., 2023)

APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah, APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah serta ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bisa dilihat dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020) tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas berasal dari kata "*accountability*" dalam bahasa Inggris, yang berarti "pertanggungjawaban", "keadaan untuk dipertanggungjawabkan", atau "keadaan untuk diminta pertanggungjawaban". Akuntabilitas, juga dikenal sebagai tanggung jawab, berarti bahwa setiap elemen

yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan perusahaan melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing (Mareta & Fakhri, 2024). Jika seseorang atau pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya publik dan hal-hal yang berkaitan dengannya memiliki tanggung jawab untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan mereka, itu disebut akuntabilitas. Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah jenis tanggung jawab yang diberikan atas wewenang yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan tentang kegiatan yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. (Ronni Wati Manihuruk et al., 2023)

Akuntabilitas keuangan berarti menjaga kerahasiaan keuangan, mengungkapkan informasi, dan mematuhi undang-undang. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh badan pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK, 2010). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. (Pinontoan et al., 2023)

Transparansi

Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Dasar Hukum Transparansi Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) Tentang satu data indonesia bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan Transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Menurut (Firmansyah, 2020) Transparansi merupakan suatu prinsip dalam *good governance* yang di definisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat serta memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2019) Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan juga penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Tiswiyanti (2023) Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang akan di ajukan adalah Akuntabilitas keuangan dan Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan

HIPOTESIS

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan

Semua pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas, seperti yang dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas, yang merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan efisien. Akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum diikuti menunjukkan relevansinya dengan pengelolaan keuangan..

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Yassir et al., (2022) yang menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Hasugian et al., 2021). Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas maka dapat di rumuskan hipotesis yang akan di ajukan adalah :

H₁ = Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan

Menurut Firmansyah (2020) Ketika masyarakat memiliki akses ke informasi yang luas tentang pengelolaan daerah, transparansi, atau prinsip *good governance*, memungkinkan mereka mengawasi sehingga kebijakan publik yang dibuat dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan mencegah

kecurangan dan manipulasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2019) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut (Riberu & Asyik, 2023) Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas maka dapat di rumuskan hipotesis yang akan di ajukan adalah :

H_2 = Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

Pengaruh akuntabilitas keuangan dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban publik atas operasi pemerintahan. Dalam manajemen keuangan pemerintah, akuntabilitas keuangan adalah standar yang harus dipatuhi, sehingga pemerintahan bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena publik akan bertanggung jawab, pejabat pemerintah akan berusaha menerapkan konsep akuntabilitas ini dalam mengelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. Akuntabilitas terkait dengan aktivitas kontrol, terutama dalam hal mencapai hasil pelayanan publik dan memberikan informasi tentang hasil tersebut kepada masyarakat umum. (Kalesaran et al., 2023)

Amanat dari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pemerintahan, yang dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan, transparansi telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang operasi pemerintahan daerah. Aparatur juga secara naluri menginginkan opini publik tentang kualitas pekerjaan mereka. Karena itu, aparatur pemerintah akan bekerja dengan kinerja terbaiknya saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang berarti bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kinerja pemerintah daerah juga akan baik (Yassir et al., 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2019) Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2019) Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan juga penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Tiswiyanti, 2023) Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang akan di ajukan adalah :

H_3 = Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *Survey* Menurut Sugiyono (2017) pengertian metode *Survey* adalah Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket dan dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Namun, data yang dipelajari berasal dari sampel populasi, sehingga dapat ditemukan hubungan antara variabel sosiologis dan psikologis dan kejadian yang sebanding. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data crossection yaitu sekumpulan data yang dilihat dalam satu waktu tertentu. Data primer di kumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada seluruh responden yang di isi dengan beberapa pernyataan dengan lima opsi jawaban yang akan di beri bobot skor seperti jawaban (Sangat Setuju =5, Setuju=4, Cukup Setuju=3, Tidak Setuju = 2, Sangat tidak setuju=1).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan dari analisis linier berganda adalah untuk menentukan arah dan dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018). Informasi tentang data yang sudah di kumpulkan kemudian di olah menggunakan SPSS. Data yang telah di kumpulkan akan dianalisis melalui empat tahapan pengujian. Tahap pertama

adalah melakukan uji statistik dekriptif, Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas), Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis dilakukan dengan menggunakan (Uji Koefisien Determinasi, Uji F, Uji T)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas item; ini berarti menguji kualitas soal-soal dalam kuisioner. nilai koefisien korelasi, merupakan ukuran yang menentukan apakah item kuisioner penelitian valid atau tidak. Setelah koefien korelasi diperoleh dari hasil perhitungan, r hitung dibandingkan dengan r_{tabel} . Jika nilai rhitung lebih besar dari harga r_{tabel} , maka perhitungan dianggap valid. Nilai r_{tabel} ditentukan melalui tabel DF (*degree of freedom*), dengan menggunakan rumus ($df = N-2$) dimana N adalah jumlah responden. Kemudian di tarik garis dengan melihat taraf signifikansi dua arah dengan nilai 0,05 dan $N-2= 51$ maka di peroleh hasil r_{tabel} 0,2706 peroleh Hasil dari uji validitas disajikan dalam

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (X1)	X1.1	0.670	0,2706	Valid
	X1.2	0.700	0,2706	Valid
	X1.3	0.603	0,2706	Valid
	X1.4	0.590	0,2706	Valid
	X1.5	0.603	0,2706	Valid
Variabel	Item pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Akuntansi (X2)	X2.1	0.785	0,2706	Valid
	X2.2	0.760	0,2706	Valid
	X2.3	0,827	0,2706	Valid
Variabel	Item pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pengelolaan Keuangan (Y)	Y1.1	0.845	0,2706	Valid
	Y1.2	0.845	0,2706	Valid
	Y1.3	0.898	0,2706	Valid
	Y1.4	0.710	0,2706	Valid
	Y1.5	0.524	0,2706	Valid

Analisis Linear Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,142	2,811		4,675	,000
Total_X1	,223	,088	,329	2,533	,014
Total_X2	,318	,117	,352	2,714	,009

Berdasarkan hasil analisis linear berganda nilai konstanta (nilai α) sebesar 13,142 dan untuk Akuntabilitas Keuangan (Nilai β) sebesar 0,223 sementara Transparansi (Nilai β) sebesar 0,318. Sehingga dapat di peroleh persamaan linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,142 + 0,223 X_1 + 0,318 X_2 + e$$

Yang berarti :

- Nilai Pengelolaan Keuangan (Y) sebesar 13,142 yang menyatakan jika variabel X_1 dan X_2 sama dengan nol yaitu Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi maka Pengelolaan Keuangan adalah sebesar 13,142
- Koefisien X_1 sebesar 0,223 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_1 (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 1% maka Pengelolaan Keuangan Meningkatkan sebesar 0,223 (22,3%) atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_1 (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 1% maka pengelolaan keuangan menurun sebesar 0,223 (22,3%)
- Koefisien X_2 sebesar 0,318 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_2 (Transparansi) sebesar 1% maka Pengelolaan Keuangan Meningkatkan sebesar 0,318 (31,8%) atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_2 (Transparansi) sebesar 1% maka pengelolaan keuangan menurun sebesar 0,318 (31,8%)

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,432 ^a	,187	,154	,395

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat adjusted R Square = 0,154, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan transparansi dapat menjelaskan pengelolaan keuangan yaitu sebesar 15,4 % sedangkan sisanya 84,6 % ($100 - 15,40 \times 100$) di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen akuntabilitas keuangan dan transparansi dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang sama atau simultan terhadap variabel dependen pengelolaan keuangan

Tabel 4. Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,559	2	4,779	5,782	,006 ^b
	Residual	41,327	50	,827		
	Total	50,886	52			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. $0,006 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas keuangan dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan

Uji T (uji parsial)

Uji T digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	13,142	2,811		
Total_X1	,223	,088	,329	2,533	,014
Total_X2	,318	,117	,352	2,714	,009

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Keuangan (X1) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$ atau nilai t_{hitung} 2,533 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,008. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Keuangan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Transparansi (X2) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) dengan nilai sig $0,09 < 0,05$ atau t_{hitung} adalah 2.714, sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.008 dengan nilai signifikan 0,009. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Akuntabilitas Keuangan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). Hal ini karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,533 > 2,008$), dan nilai signifikan lebih rendah dari standar alpha ($0,014 < 0,05$). Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). Hal ini karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2.714 lebih besar dari 2.008) dan nilai signifikan lebih rendah dari standar alpha (0,009 lebih rendah dari 0,05). maka H_a diterima dan H_0 ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa karyawan, terutama yang bekerja di bagian keuangan, telah menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan mereka selama ini telah dianggap transparan. karena setiap tugas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan telah menggunakan *standar operating procedure* (SOP). SOP ini telah digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan manfaatnya untuk memberikan pelayanan publik. Pada kasus ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola aset publik dengan niat baik dan demi kepentingan rakyat, menurut teori stewardship. Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah cara untuk memastikan bahwa dana

publik digunakan secara efektif, terbuka, dan selaras dengan kepentingan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riberu & Asyik, 2023) dimana akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) juga mengemukakan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Teori *stewardship* menyatakan bahwa jika pengelolaan keuangan pemerintah daerah tampak jelas, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan akses mudah ke laporan keuangan, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik, melacak kinerja, dan mengawasi penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Hasugian et al., 2021). Studi lain (Alfiani & Estiningrum, 2021) juga menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil Pengujian Hipotesis Menunjukkan Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah di Kabupaten Minahasa, dimana Semakin banyak transparansi, semakin baik pengelolaan keuangan. Faktor transparansi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Minahasa telah diterapkan secara efektif dan efektif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing unit SKPD dapat menyajikan informasi keuangan mereka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berdampak pada pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Minahasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan akuntabilitas keuangan, pemerintah kabupaten Minahasa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional melalui mekanisme kolaboratif. Selain itu, kepatuhan dan kredibilitas akuntabilitas keuangan dipertimbangkan, dan transparansi membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi dan keuangan yang berlaku. Perusahaan dapat membangun kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Ini memastikan akses ke modal yang lebih baik dan tingkat biaya yang lebih rendah.

Transparansi dapat menjadi pendorong bagi perilaku bertanggung jawab manajemen. Dengan mengetahui bahwa tindakan dan keputusan manajemen diungkapkan secara publik, manajemen mungkin lebih cenderung mengelola keuangan perusahaan dengan hati-hati, meminimalkan risiko, dan memprioritaskan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Dengan demikian, transparansi tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip teori *stewardship*, tetapi juga menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yassir et al., 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dan Transparansi berpengaruh pada pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang di peroleh, maka dapat di simpulkan bahwa : Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya tanggungjawab yang baik dalam mengelola keuangan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengelolaan keuangan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa.

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal ini membuktikan bahwa jika dalam ruang lingkup pemerintahan adanya transparansi atau keterbukaan maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa

Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan dan transparansi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan. Karena dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dapat bekerja dengan bertanggungjawab dan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun saran dari penelitian ini bagi pemerintah kabupaten Minahasa untuk meningkatkan publikasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, Dalam hal akuntabilitas keuangan, dapat memberikan pembekalan yang cukup kepada tiap pegawai khususnya sebagai pengelola keuangan Pemerintahan, dan perlunya peningkatan akan Penyesuaian analisis jabatan pada sektor keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikan di jurusan keuangan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel lain terkait pengelolaan keuangan yang belum di teliti dalam penelitian ini, misalnya variabel pengawasan keuangan.

REFERENSI

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. (2022). *Indeks Persepsi Anti Korupsi*. <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzNSMy/indeks-persepsi-anti-korupsi-ipak-menurut-wilayah-pelayanan-statistik-terpadu.html>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Firmansyah, A. (2020). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Penerbit Adab*, July, 108.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>
- Kalesaran, D. M., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *JEKMA (Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(3), 34–47.
- Kejari Minahasa Tahap 2 tersangka Baru Tipikor Dana BOKB T.A 2022*. (n.d.). <https://kejariminahasa.kejaksanaan.go.id/kejari-minahasa-tahap-2-tersangka-baru-tipikor-dana-bokb-t-a-2022/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>
- Kementerian PAN. (2022). *Data Indeks RB dan SAKIP*. <https://1data.menpan.go.id/>
- Mareta, F. C., & Fakhri, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. *Peraturan Presiden*, 004185, 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 77 Tahun 2020*. (n.d.). [https://jdih.blorakab.go.id/archive/PERMENDAGRI-77-2020-PEDOMAN PENGELOLAAN KEU-DAERAH.pdf](https://jdih.blorakab.go.id/archive/PERMENDAGRI-77-2020-PEDOMAN%20PENGELOLAAN%20KEU-DAERAH.pdf)
- Peraturan Pemerintah No 12*. (2019). [https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019#:~:text=PP ini mengatur mengenai lingkup,yang dikuasai oleh pemerintah daerah.](https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019#:~:text=PP%20ini%20mengatur%20mengenai%20lingkup,yang%20dikuasai%20oleh%20pemerintah%20daerah.)
- Pinontoan, T. S., Kantohe, M. S. S., & Karundeng, F. (2023). Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 187–195. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4251>
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4, 163–177.
- Riberu, M. A. R., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12, 1–17.
- Ronni Wati Manihuruk, Tinneke E.M. Sumual, J. K. (2023). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow*.
- Trisnawati, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5436>
- Yanti, E. R., & Tiswiyanti, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64.
- Yassir, Mursalim, & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 477–494. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>
- Zega, S. I., Tanor, L. A. O., & Lontoh, M. P. (2023). *DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA*. 1(2), 76–83.